

PRO KONTRA ATM KONDOM DALAM PERSPEKTIF TEORI SPIRAL KEHENINGAN

Oleh

Yoseph Andreas Gual

Penyebaran penyakit HIV/AIDS telah tiba pada titik mengkhawatirkan umat manusia. Hal ini dapat dilihat dari data yang dipapar United Nation Programme on HIV/AIDS (UNAIDS). Pada periode Juni 2008 penderita AIDS di dunia mencapai angka 34,3 juta jiwa (Husaini, 2001: 68). Di Indonesia, UNAIDS menyebutkan, dari 220 juta jiwa, hingga akhir November 2005, terdapat 8.251 kasus HIV/AIDS, terdiri dari 4.065 kasus HIV dan 4.4186 kasus AIDS (<http://fadhli03bakar.multiply.com/journal/item/2>). Ini angka yang ter-cover. Masih banyak penderita yang tidak ter-cover. Mereka “menyembunyikan” diri atau “disembunyikan” keluarga karena tidak ingin mempermalukan keluarga. Ada pameo dalam masyarakat yang mengatakan bahwa penyakit HIV/AIDS merupakan penyakit “hina.” Mereka yang terjangkit pasti perilaku sosialnya buruk. Selain itu, hitungan penyebarannya, satu penderita berpotensi menyebarkan penyakitnya ke seratus orang lain.

Melihat realitas ini, tahun 2005, tepatnya tanggal 20 Desember, Dinas Kesehatan dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengeluarkan sebuah program yang bertujuan untuk membantu mencegah penularan penyakit HIV/AIDS, penyakit menular seksual (PMS) serta menggalakan program KB dengan menempatkan ATM Kondom (*Condom Vending Machin*) di tempat-tempat umum. Kebijakan ini merupakan tindakan lanjutan dari apa yang sudah dikeluarkan WHO karena melihat perkembangan penyakit HIV/AIDS di dunia yang meningkat tajam (<http://forum.upi.edu>).

Kebijakan ATM Kondom pemerintah ini mendatangkan pro kontra di tengah masyarakat (<http://gatra.com>, 8 Januari 2006), (<http://BangkaPos.cetak>, 14 Oktober 2010), (<http://forum.upi.edu>, 24 Mei 2006), (<http://www.rifka.dejavu.blog>, 16 Juli 2008).

Pendapat yang kontra mengatakan bahwa dengan mengeluarkan kebijakan ATM Kondom secara tidak langsung pemerintah ‘melegal’ seks bebas bagi masyarakat dan sarana untuk mengarahkan masyarakat pada perzinahan massal. Selain itu, kondom merupakan ‘alat’ di ranah privat bagi mereka yang sudah sah terikat dalam hubungan

suami istri bukan ‘alat’ di ranah publik dan bagi semua orang. Efek jauh dari kebijakan ini dapat berpotensi merusak budaya bangsa.

Sementara yang pro menilai, kebijakan ini bukan untuk ‘menghalalkan’ plus ‘melegalkan’ seks bebas dan perzinahan tapi sebetulnya tindakan antisipatif dan pencegahan terhadap penyebaran penyakit HIV/AIDS yang perkembangannya dari waktu ke waktu kian cepat lagi menakutkan di masyarakat. Kelompok ini, berargumen bahwa berdasarkan hasil penelitian, ditemukan tingkat hubungan seks pra menikah tanpa menggunakan kondom cukup tinggi di kalangan remaja sehingga menjadi naif jika dikatakan bahwa dengan adanya kebijakan ATM Kondom, menyuburkan perilaku seks bebas dan perzinahan. Sebaliknya seks bebas dan perzinahan dalam masyarakat telah berkembang luas, kondisi semacam ini berpotensi menyebarkan HIV/AIDS karena itu, sebaiknya pemerintah menyediakan alat pencegah penyebaran (<http://forum.upi.edu>).

Lepas dari pro kontra Kebijakan ATM Kondom, masyarakat mengetahui kebijakan ini melalui interaksi pribadi mereka, pemberitaan media massa dan interaksi-interaksi lain di media on-line. Ini berarti peran sosialisasi dan informasi yang dijalankan media sangat besar untuk sebuah isu publik. Dari pemberitaan-pemberitaan media, ditemukan bahwa media mencoba membenturkan kedua pilihan (pro dan kontra) bagi masyarakat agar masyarakat mampu memilih sendiri pendapatnya. Tetapi jika ditelisik lebih jauh, media cenderung lebih dominan memberitakan aspek kontra dari kebijakan pemerintah ini. Terlihat dari sumber-sumber berita yang diangkat media lebih mengarah pada para tokoh agama, orang tua dan kaum puritan yang masih berpegang pada nilai-nilai dasar moral. Efek lanjutan dari pola ini adalah terbentuknya kelompok mayoritas-minoritas di tengah masyarakat sehubungan dengan isu publik ini.

Masalah inilah yang coba saya kaji menggunakan pola pikir Teori Spiral Keheningan Elisabeth Noelle-Neumann.

Spiral of Silence Theory

Teori Spiral Keheningan menghubungkan opini publik, pendapat pribadi dan media massa. Teori yang ditelorkan Elisabeth Noelle-Neumann tahun 1974, sarjana komunikasi sekaligus peneliti opini publik ini melihat eratnya korelasi ketiga unsur tersebut.

Teori ini menyebutkan bahwa di dalam masyarakat terdapat banyak pendapat tentang isu-isu publik namun media massa menyerap pendapat masyarakat khususnya

pendapat mayoritas lalu memberitakan pendapat tersebut kepada masyarakat yang pada akhirnya membentuk dan memperteguh opini publik yang sudah ada.

Pada titik ini, individu yang berada dalam kelompok mainstream/mayoritas akan secara leluasa mengungkapkan ide-idenya karena didukung oleh pendapat mayoritas sedangkan kelompok yang opininya berseberangan dengan kelompok mayoritas cenderung akan diam atau mengubah pendapat mereka mengikuti pendapat mayoritas karena takut diisolasi oleh kelompoknya (Littlejohn & Foss, 2009: 927).

Untuk memahami lebih baik, perlu dijelaskan empat hal penting sehubungan dengan teori ini yakni opini publik, peran media, asumsi-asumsi dasar dan *hard core*.

Opini publik. Menurut Neumann inti dari berbagai istilah dalam teorinya adalah opini publik. Setelah menelisik lima puluh definisi tentang opini publik, Neumann merasa tidak puas dengan definisi yang didapatnya sehingga ia mencoba mendefinisikan opini publik bagi kepentingan teorinya ini.

Dalam bukunya, *The Spiral of Silence: Public Opinion Our Social Skin*, Neumann memisahkan opini publik menjadi dua istilah yang terpisah: opini dan publik (West&Turner 2007: 444-445). Neumann melihat dalam kata publik terdapat tiga makna. *Pertama*, publik merujuk pada keterbukaan bagi semua orang, misalnya: “tanah publik” atau “walayah publik.” Di sini publik memiliki asosiasi hukum. *Kedua*, publik berhubungan dengan orang atau isu. Misalnya: “tanggung jawab publik para jurnalis.” *Ketiga*, publik mengacu pada aspek sosial-psikologis manusia. Publik di sini, terfokus pada bagaimana individu melihat dirinya tidak semata individu melainkan memiliki hubungan dengan orang lain di luar dirinya. Sehingga muncul misalnya, frase “tatapan publik.” Neumann menyimpulkan bahwa individu akan menyesuaikan sikap dan tindakannya berdasarkan pengetahuan mereka akan “tatapan orang” atas mereka. Ia menyatakan, dalam definisi-definisi sebelumnya tentang opini publik, para ahli lupa menyentil aspek sosial-psikologis ini, pada hal aspek inilah yang memberi makna pada sikap individu ketika berhadapan dengan situasi publik.

Sementara menurut Neumann, opini merupakan ekspresi dari suatu sikap. Dalam hal intensitas dan stabilitas, opini dapat bervariasi. Neumann mencoba melihat kembali definisi opini merujuk pada interpretasi bahasa Prancis dan Inggris dan ia menemukan bahwa opini adalah tingkat persetujuan dan populasi tertentu. Dalam teorinya, Neumann mengatakan bahwa opini adalah sesuatu yang dianggap diterima.

Berdasarkan telaah mendalam akan makna kedua kata tersebut, Neumann kemudian mencoba menggabungkan dua kata ini dalam satu istilah, opini publik dengan mendefinisikannya sebagai sikap atau perilaku yang harus diekspresikan oleh individu di depan publik jika ia tidak ingin dirinya terisolasi. Di area kontroversi atau perubahan, opini publik dimaknai sebagai sikap yang dapat diekspresikan tanpa harus memunculkan bahaya akan isolasi terhadap dirinya.

Media Massa. Bagaimana peran media massa membentuk opini publik seperti yang dikemukakan Neumann di atas? Menurut Neumann (West&Turner 2007: 449-451) media memiliki kekuatan besar dalam mempengaruhi opini publik. Hal ini ia perhitungkan dalam tiga karakteristik media yakni *pertama, ubiquity*. Aspek ini mengarah pada keyakinan bahwa media merupakan sumber informasi dan ada di mana saja. Setiap hari, mereka yang mencari informasi selalu akan mengarahkan diri mereka pada media. Karena itu tingkat keterpengaruhan individu akan media sangat besar.

Kedua, cumulativeness. Tertuju pada proses repetisi yang dilakukan media akan sebuah isu baik melalui berbagai program acara maupun lewat waktu penyayangan. Frekwensi penyayangan akan sebuah informasi sangat mempengaruhi terbentuknya opini publik seperti yang diberitakan oleh media. Opini media menjadi opini publik.

Ketiga, consonance. Merujuk pada keyakinan bahwa semua media memiliki kesamaan dalam keyakinan, tindakan dan nilai-nilai yang dianut. Hal ini mendorong pemahaman publik yang terpapar oleh media akan sama dengan apa yang diberitakan media.

Ketiga karakteristik media inilah yang menjadi kekuatan media saat mengarahkan opini mayoritas untuk didengar dan dipercaya publik.

Tiga Asumsi Teori Spiral Keheningan. Menurut Neumann ada tiga asumsi yang melandasi teorinya (West&Turner 2007: 445-449). Asumsi ini akan membantu menjelaskan secara gamblang proses kerja Teori Spiral Keheningan.

Asumsi pertama, masyarakat mengancam individu yang menyimpang dengan adanya isolasi. Rasa takut akan isolasi sangat berkuasa. Neumann berkeyakinan bahwa struktur masyarakat terbentuk dan stabil terjaga oleh kesepakatan anggota masyarakat akan nilai-nilai yang mengikat mereka. Dan opini publiklah yang menentukan apakah seluruh populasi masyarakat meyakini dan menjalankan seperangkat nilai yang dianut itu atau

tidak. Ketika individu merasa bahwa ia berada dalam garis lingkaran kesepakatan nilai maka ia akan merasa aman dari isolasi sosial. Sebaliknya bila individu merasa bahwa dirinya berada di luar garis, ia merasa takut akan hukuman isolasi ini. Hukuman isolasi berat sebab individu akan dinilai berbeda dan menyimpang dari kelompoknya. Rasa takut terhadap isolasi menyebabkan individu mengikuti arus kelompok mayoritas terlepas pendapat mereka masuk akal atau tidak/salah atau benar.

Asumsi kedua, ketakutan terhadap isolasi menyebabkan setiap saat individu mencoba menaksir iklim opini yang sedang berkembang. Neumann mengatakan sumber informasi bagi individu berasal dari observasi pribadi dan media.

Sumber pertama, observasi pribadi. Orang terlibat dalam *quasi statistik* untuk mengevaluasi opini publik. Indera kuasi statistik berarti individu mampu memperkirakan kekuatan dari sisi-sisi berlawanan di dalam suatu debat publik. Mereka mampu melakukan hal ini dengan mendengarkan pendapat orang dan menggabungkannya dengan pendapat sendiri. Observasi pribadi kadangkala tidak akurat/bias atau dalam bahasa Neumann *ketidaksadaran pluralistik (pluralistic ignorance)* karena individu mencampuradukan antara persepsi pribadi mereka sendiri dengan persepsi yang sudah difilter oleh media ke dalam suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan yang tampaknya berasal dari pikiran sendiri.

Sumber kedua, dari media. Individu menggunakan media untuk mengonfirmasi atau tidak mengonfirmasi observasi pribadi mereka dan kemudian menginterpretasikan pengamatan mereka melalui media. Dengan gabungan antara observasi pribadi dan media, individu dapat mengetahui sejauh mana isu publik sedang bergerak. Apakah isu minoritas sudah berbalik menjadi isu mayoritas atau tidak. Jika hal tersebut terjadi, keberanian kelompok minoritas untuk berpendapat saat berhadapan dengan kelompok mayoritas lain akan muncul sebab mereka merasa didukung oleh lebih banyak orang dan pendapat mereka telah mendapat 'legitimasi' publik melalui publikasi media.

Asumsi ketiga, perilaku publik dipengaruhi oleh evaluasi mereka akan opini publik. Perilaku publik dapat berupa berbicara akan suatu topik publik atau diam. Ketika individu merasa bahwa sebuah isu publik yang ingin ia bicarakan didukung oleh publik maka individu tersebut akan membahasakannya namun sebaliknya jika dirasa apa yang akan dibicarakan tidak didukung publik maka sang individu cenderung akan diam. Kekuatan

dari pendukung sebuah isu dan kelemahan dari pendukung lain merupakan faktor pendorong terbentuknya sebuah spiral.

Hard Core. *Hard core* merupakan sekelompok orang yang secara berani menentang suara mayoritas dan bersedia menanggung resiko atas sikap berbeda mereka ini (Griffin, 2006: 416). Mereka tidak takut akan ancaman isolasi dari kelompok mayoritas dan tetap berpegang pada pendirian mereka yang minoritas. Kelompok ini kadangkala dengan cara mereka yang berani berhasil menarik minat media dan akhirnya apa yang mereka percayai mendesak suara mayoritas. Ide mereka diterima publik dan menjadi ide mayoritas.

ATM Kondom dalam Perspektif Teori Spiral Keheningan

Identifikasi Kelompok dan Latar. Pro kontra Kebijakan ATM Kondom dapat dijelaskan dengan menggunakan perspektif Teori Spiral Keheningan. Ketika kebijakan ini dikeluarkan pemerintah, masyarakat Indonesia memiliki pandangan moral etis sebagai nilai yang mengikat mereka. Nilai tersebut, misalnya, berhubungan dengan bagaimana laki-laki dan perempuan berhubungan dalam 'ruang'. Hubungan antara laki-laki dan perempuan baik di tingkat ruang intim, ruang pribadi, ruang sosial maupun ruang publik telah ada standarnya. Pelanggaran terhadap ruang-ruang tersebut merupakan penodaan dan pencemaran bagi kehidupan bersama.

Kemunculan Kebijakan ATM Kondom merupakan sebetulnya penodaan dan pencemaran akan ruang dan relasi dalam masyarakat. Mengapa? Bagi mayoritas masyarakat, kondom adalah barang privat bagi kelompok orang yang memiliki hubungan intim dan diekspresikan di ruang privat. Kebijakan ini mengubah nilai yang dipercaya masyarakat. Kondom menjadi barang umum dari sisi ruang sekaligus dari sisi relasi. Kehadiran kondom di tempat-tempat umum secara bebas sebenarnya secara tak sadar memporakporandakan kepercayaan kelompok masyarakat luas akan makna hubungan intim antarmanusia. Hubungan intim yang dipercaya secara tradisional milik pasangan sah suami istri, sadar atau tidak sedang dirobek oleh kehadiran ATM Kondom yang ditujukan bebas bagi semua orang. ATM Kondom secara tersirat menentang nilai kelompok mayoritas.

Kelompok ini diwakili oleh pemuka agama, orang tua, pendidik, para puritan, kelompok 'berahlak,' dan kelompok-kelompok lain yang selalu menjaga nilai-nilai kemasyarakatan dan budaya.

Di samping kelompok mayoritas, ada kelompok lain yang oleh pergaulan dan tingkat pendidikan pola berpikir mereka lebih cair dan cenderung permisif terhadap nilai-nilai yang dianut masyarakat setempat. Mereka lebih kritis dan ingin bebas. Tidak ingin terikat dengan nilai lama. Panduan hidup adalah rasionalitas dan kebebasan. Pola pikir mereka cenderung dituntun oleh sisi kemanfaatan bagi diri sendiri. Mereka mampu berpikir dikotomis tentang berbagai hal dan mampu menyesuaikan diri dengan ide dan nilai baru. Di sisi lain mereka masih menghormati nilai-nilai yang ada di sekitar mereka.

Kelompok ini diwakili oleh kaum terpelajar, kelompok profesi, kelompok yang sering terterpa media, pemuda pelajar yang agamanya masih abu-abu dan kelompok lain. Kelompok ini masih kecil dalam masyarakat tetapi kian hari kian bertambah.

Inilah realitas dua kelompok, mayoritas dan minoritas ketika kebijakan ATM Kondom muncul.

Peran Media Massa. Jika ditinjau dari dikotomi mayoritas-minoritas di atas, kebijakan ATM Kondom sebenarnya mewakili kelompok minoritas yang melihat dunia tidak lagi hitam putih. Hal ini berbenturan dengan kelompok mayoritas dengan nilai yang dianutnya. Maka jangan heran jika kebijakan ini ditampik kelompok mayoritas. Lalu di mana peran media massa?

Menurut DeVito (1997: 515-517) salah satu fungsi media massa adalah mengukuhkan-memperkuat sikap, kepercayaan atau nilai orang daripada mengubahnya. Jika ditinjau dari aspek ini maka, media berada pada posisi mayoritas. Pemberitaan media akan kebijakan pemerintah selain menjalankan fungsi informasi sekaligus juga berperan sebagai pengawas lingkungan (Wright, 1986: 8). Media mengingatkan kelompok mayoritas bahwa ada 'ancaman' terhadap nilai-nilai yang mereka dianuti dari kelompok lain. Sudut pandang pemberitaan media yang menampilkan tokoh-tokoh mayoritas memposisikan media berada di kelompok mana.

Spiral Keheningan. Setelah melihat kedudukan media di antara kedua kelompok, kini saya mencoba menjelaskan fenomena ATM Kondom menggunakan ketiga asumsi Teori Spiral Keheningan.

Asumsi pertama, masyarakat mengancam individu yang menyimpang dengan adanya isolasi. Rasa takut akan isolasi sangat berkuasa. Pada asumsi pertama, kelompok mayoritas menunjukkan powernya melalui aksi penolakan terhadap kebijakan.

Penolakan kelompok mayoritas bukan didasarkan pada alasan bahaya penyebaran penyakit HIV/AIDS melainkan tergerusnya nilai-nilai hidup bersama kelompok. Protes dan penolakan yang terjadi, misalnya di Sumatra Barat (<http://www.rifka.dejavu.blog>), di Sleman-Yogyakarta (<http://gatra.com>), di Kepulauan Bangka Belitung (<http://BangkaPos.cetak>), dan di Jawa Barat (<http://forum.upi.edu>) sebenarnya memberikan *warning* sekaligus ancaman bagi individu yang berseberangan dengan pandangan kelompok mayoritas.

Melihat fenomena ini, individu di kelompok minoritas cenderung akan diam atau mengiyakan apa yang dianggap benar oleh kelompok mayoritas agar tidak mendapat sanksi isolasi sosial. Kisah menarik, yang diceritakan oleh seorang dokter di Sumatera Selatan tentang tekanan (isolasi) yang dialaminya di sebuah seminar hingga ia harus meminta maaf dan mengakui bahwa apa yang dibuatnya salah karena menceritakan pengalamannya membagi kondom di sekitar lokalisasi merupakan bukti sederhana bagaimana kuatnya dampak isolasi sosial bagi individu minoritas (<http://www.rifka.dejavu.blog>).

Asumsi kedua, ketakutan terhadap isolasi menyebabkan setiap saat individu mencoba menaksir iklim opini yang sedang berkembang. Dokter di Sumatera Selatan sebenarnya memiliki basis pengetahuan yang jelas akan manfaat kondom bagi penggunaannya. Namun kebenaran pendapatnya dikalahkan oleh pendapat mayoritas. Isolasi sosial yang ia dapatkan menyebabkan sang dokter setelah kejadian yang dialaminya akan terus mengikuti perkembangan isu ini melalui interaksi dengan sesamanya. Sang dokter akan menyerap berbagai pendapat untuk dijadikan sebagai referensi.

Pendapat-pendapat ini kemudian dikonfirmasi lagi dengan pandangan media massa lewat liputan mereka maupun lewat internet. Ketika pandangan media massa pada akhirnya berubah positif terhadap pandangan sang dokter, sang dokter akan melihat bahwa ia tidak sendirian, ia memiliki bukti bahwa pandangannya didukung oleh kelompok masyarakat lain dan telah 'didukung' media massa. 'Dukungan' ini akan mendorong keberanian sang dokter dalam mengungkapkan pendapatnya di depan umum saat berhadapan kembali dengan kelompok mayoritas.

Asumsi ketiga, perilaku publik dipengaruhi oleh evaluasi mereka akan opini publik. Ketika mengamati lingkungan sosialnya, sang dokter akan merekam pendapatnya masuk dalam kelompok mayoritas atau minoritas. Jika pandangannya masih berada pada posisi minoritas maka sang dokter cenderung diam atau menerima pandangan kelompok

mayoritas jika isu ATM Kondom dibicarakan. Sebaliknya, jika pandangan sang dokter termasuk pandangan mayoritas atau bergerak ke arah mayoritas maka sang dokter akan dengan leluasa mengungkapkan idenya tentang ATM Kondom di depan publik.

Kelompok Kepala Batu. Dalam kasus pro kontra kebijakan ATM Kondom, ada kelompok keras kepala yang tetap bertahan pada pendirian mereka. Mereka tidak terpengaruh dengan ancaman isolasi kelompok mayoritas. Kelompok ini, biasanya adalah para aktivis yang bergerak dalam advokasi HIV/AIDS, kelompok LSM, para aktor pembuat kebijakan, tenaga profesional dan kaum cerdik pandai.

Kelompok ini akan terus kritis dan melakukan aktivitas mereka tanpa takut terisolasi. Tindakan mereka menjadi menarik dan akan menjadi referensi pemberitaan media massa. Mereka akan menggelar demonstrasi damai, seminar dan serasehan dan berbagai sosialisasi tentang manfaat ATM Kondom tanpa terpengaruh dengan ancaman isolasi kelompok mayoritas.

Kesimpulan

Teori Spiral Keheningan merupakan pisau yang baik guna menganalisis kebijakan dan isu-isu publik yang banyak mengandung pro kontra di Indonesia. Dengan teori ini kita menemukan siapa kelompok mayoritas dan yang kelompok minoritas, serta bagaimana isu sebuah isu bergerak di antara kelompok mayoritas dan minoritas. Kita juga bisa mengetahui bagaimana pendapat kelompok minoritas bergerak menjadi pendapat mayoritas dan sebaliknya.

Teori ini menawarkan kepada kita sebuah pemahaman yang menarik akan fenomena opini publik dan dengannya kita menjadi peka dan mampu menentukan pilihan.

REFERENSI

DeVito, Joseph. 1997. Komunikasi Antarmanusia. Jakarta: Professional Books.

Griffin, EM. 2006. A First Look at Communication Theory. Six Edition. New York: McGraw-Hill.

Husaini, Adian. 2001. Rajam dalam Arus Budaya Syawat: Penerapan Hukum Rajam di Indonesia dalam Tinjauan Syariat Islam, Hukum Positif, dan Politik Global. Pustaka Al-Kautsar.

Littlejohn. W. Stephen & Foss A. Karen. 2009. Encyclopedia of Communication Theory. California: Sage.

West, Richard & Turner, H. Lynn. 2007. Introduction Communication Theory: Analysis & Application. Third Edition. New York: McGraw-Hill.

Wright, R Charles. 1986. Sosiologi Komunikasi Massa. Bandung: Remadja Karya.

<http://BangkaPos.cetak>, diunduh 17 Januari 2012.

<http://forum.upi.edu>, diunduh 17 Januari 2012.

<http://fadhli03bakar.multiply.com/journal/item/2> diunduh 17 Januari 2012.

<http://gatra.com>, diunduh 17 Januari 2012.

<http://www.rifka.dejavu.blog>, diunduh 17 Januari 2012.